

Tanggapan untuk IGN Putra dan AZ Abar:

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

Dominasi dan Resistansi

Ariel Heryanto

PARA ilmuwan sosial di berbagai negara belakangan ini menghadapi persimpangan jalan bila membicarakan makna dan daya jangkau perlawanan kaum bawah, khususnya petani di daerah pedesaan, terhadap kekuasaan yang menghimpitnya. Persimpangan jalan itu bukan sekadar bersifat akademis, atau teoretis dan metodologis, tapi juga politis dan praktis. Mereka seakan-akan harus memilih salah satu dari dua kecenderungan.

Pertama, kecenderungan memberikan nilai tinggi bagi perlawanan kaum bawah. Perlawanan itu dikisahkan sebagai kepahlawanan kaum tertindas yang benar. Kemenangan bagi perjuangan mereka tidak dapat diraih secara drastis dalam waktu singkat, bahkan tidak dapat dipastikan. Tapi disimpulkan setidak-tidaknya bahwa kaum bawah tidak mudah diperdaya oleh kaum berkuasa. Mereka memanfaatkan setiap peluang untuk membangkang dan merongrong kekuatan penguasa hingga ambruk.

Kedua, kecenderungan yang menekankan kuatnya kaum berkuasa dan betapa tak berdaya kaum rentan. Kaum berkuasa senantiasa menang dalam mempertahankan keadaan yang sedang mapan. Mereka tidak menginginkan perubahan, karena mereka diuntungkan oleh keadaan yang ada. Mereka mampu mempertahankan keadaan itu, karena mereka menguasai sumber-sumber daya dan pranata sosial untuk membuat, menyogok atau memaksa orang banyak agar patuh atau membinasakan yang masih tetap membangkang.

Kedua pilihan itu tentunya bukan dikotomi mutlak. Alternati-

tif lain atau jalan-tengah di antara dua model ekstrem itu bukan mustahil. Tapi, tak pernah mudah: Untuk jelasnya, kita perlu memahami sedikit lebih jauh pertentangan kedua pandangan itu.

Perdebatan klasik

Di kalangan ilmuwan berkecenderungan pertama, buku James Scott berjudul *Weapons of the Weak*, "Senjata Kaum Lemah", (1985) diakui sebagai salah satu puncak karya ilmiah dari aliran ini. Menurutnya, perjuangan kaum lemah, seperti petani desa, harus dipelajari dalam bentuknya yang paling sederhana dan sehari-hari. Bukan dalam bentuk pemberontakan, gerilya apalagi revolusi, sebagaimana diamati para ilmuwan sosial sejak Perang Dunia II.

Jika petani tidak mengadakan pemberontakan bersenjata, bukan berarti mereka bodoh dan tidak tahu bahwa mereka ditindas dan diperlakukan. Jika pegawai negeri di banyak negeri Dunia Kedua dan Ketiga mau memakai baju seragam kerja resmi yang ditentukan negara atau memasang foto pemimpin negara di kantor atau rumah, bukan berarti mereka tak bisa bikin lelucon jorok tentang para penguasa itu. Jika mereka ribut ikut kampanye Pemilu, bukan berarti mereka fanatik pada parti.

Di kalangan cendekiawan kita sendiri, kajian tentang "budaya-tanding" tahun 1980-an dapat digolongkan dalam kesibukan intelektual serupa. Perbincangan serius dan berkepanjangan tentang "plesetan berbahasa" pernah mewarnai rubrik opini koran ini tahun lalu. Plesetan dipahami oleh banyak

pihak sebagai sebentuk "perlawanan sehari-hari" seperti yang dijadikan pokok kajian utama James Scott di Malaysia.

Kecenderungan yang kedua pernah populer di kalangan sarjana Marxis, walaupun banyak sarjana non-Marxis yang mengutamanya dengan alasan dan dari sudut pandang lain. Teori "hegemoni" yang dikembangkan Gramsci sewaktu diperjera penguasa fasis Italia, merupakan salah satu puncak dari aliran pemikiran kedua ini. Daya tarik pandangan ini terletak dari upaya menjelaskan, mengapa banyak kaum tertindas justru bersikap seakan-akan mendukung kepentingan kaum penindasnya sendiri.

Contohnya. Di Afrika Selatan, banyak sekali tentara dan agen intel pemerintahan Apartheid yang terdiri dari orang kulit hitam. Dalam kebanyakan sejarah kolonialisme, kekuatan penjajah asing selalu (mungkin terutama) didukung oleh bangsa terjajah sendiri. Pada waktu para pengaruh pemikiran optimis itu terlalu meromantisir kekuatan kelas yang tertindas. Romantisasi ini sendiri dituluh bersumber dari elitnya kaum optimis. Menurut pihak pesimis ini, para pengaruh pemikiran optimis itu terlalu meromantisir kekuatan kelas yang tertindas. Romantisasi ini sendiri dituluh bersumber dari elitnya kaum optimis. Di satu pihak, mereka tidak merasakan kehidupan rakyat kecil yang serba terbatas, dan di pihak lain mereka berkhayal tentang pahlawan di luar lingkungannya, karena kaum intelektual romantis itu sendiri tak berkutik menghadapi kekuasaan yang ada.

Di Indonesia sendiri dan di kalangan sarjana asing yang ahli tentang Indonesia, ada kecenderungan kuat untuk menekankan maha kuatnya negara Orde Baru dalam dinamika sosial (dalam negeri). Diskusi tentang demokrasi, keterbukaan, *civil society*, swastaniasi, pemben-

tukan kelas menengah, bermuara pada kesimpulan getir tentang kekuatan negara yang tak tertandingi kekuatan lain.

Untuk mudahnya, kecenderungan pertama dapat dikatakan sebagai aliran optimis. Kecenderungan kedua, lebih pesimis.

Bagi yang optimis, kajian kaum pesimis menyepakati dan meremehkan kekuatan rakyat bawah. Lebih lanjut, ada tuduhan kaum pesimis ini berbuat demikian, karena mereka sebenarnya terdiri dari para intelektual elit yang tak kenal rakyat bawah dan potensi kekuatan dari bawah itu. Tuduhan lanjutannya ialah, perubahan harus dipimpin atau datang dari kaum intelektual yang "sadar dan bijaksana".

Pihak pesimis tak kalah hebatnya menyerang kaum optimis. Menurut pihak pesimis ini, para pengaruh pemikiran optimis itu terlalu meromantisir kekuatan kelas yang tertindas. Romantisasi ini sendiri dituluh bersumber dari elitnya kaum optimis. Di satu pihak, mereka meramalkan kegagalan kritik masyarakat. Tapi mereka tak beranjak dari ramalan semula. Mereka menulis lagi sebuah artikel (21/8/92) untuk mempertahankan pemikiran sebelumnya. Kali ini dengan ukuran (waktu) "kegagalan" yang lebih jelas, yang diulur lebih lontar. Negara pasti menang, kata mereka, walaupun kemenangan itu dapat saja tertunda. Sekali lagi tak dijelaskan, apakah ada ukuran yang "adil" dan "ilmiah" bagi batas waktu penundaan ULLAJ untuk menguji keampauhan teori dan kejatuhan ramalan mereka.

Seperi disebutkan di atas, kedua pilihan ini punya implikasi dan konsekuensi politis. Celakanya, implikasi politik keduanya memiliki cacat. Pada yang pertama (optimis) ada kecenderungan menerima dan melestarikan status quo. Karena perlawanan kecil-kecilan dan

sehari-hari sudah dianggap ada dan dirayakan, ketimpangan yang lebih besar dan struktural terlalaikan. Pada yang kedua (pesimis) ada kecenderungan sebagai peringatan bagi siapa saja yang mengkhayalkan harapan muluk-muluk, dari kegiatan protes dan kritik terhadap Negara. Tapi pandangan mereka juga layak ditimbang secara kritis, karena bisa saja konservatif secara politik, dan keliru secara teoretik.

Kasus ULLAJ

Di harian ini (3/8/92), IG Ngurah Putra dan A Zaini Abar pernah menyajikan sebuah analisa dan ramalan tentang "akhir" bagi kontroversi ULLAJ. Menurut mereka, kritik dan protes terhadap ULLAJ dapat dipastikan berakhirk dengan kegagalan. Tak dijelaskan apa ukuran gagal atau berhasil dalam hal ini.

Seminggu kemudian, muncul keputusan yang mengejutkan dari Presiden tentang penundaan pelaksanaan ULLAJ. Saya yakin keputusan itu tak diperkirakan Putra dan Abar ketika meramalkan kegagalan kritik masyarakat. Tapi mereka tak beranjak dari ramalan semula. Mereka menulis lagi sebuah artikel (21/8/92) untuk mempertahankan pemikiran sebelumnya. Kali ini dengan ukuran (waktu) "kegagalan" yang lebih jelas, yang diulur lebih lontar. Negara pasti menang, kata mereka,

separa disebutkan di atas, kedua pilihan ini punya implikasi dan konsekuensi politis. Celakanya, implikasi politik keduanya memiliki cacat. Pada yang pertama (optimis) ada kecenderungan menerima dan melestarikan status quo. Karena perlawanan kecil-kecilan dan

an Putra dan Abar dapat digolongkan sebagai pemikiran yang berkecenderungan kedua (pesimis). Pandangan mereka penting sebagai peringatan bagi siapa saja yang mengkhayalkan harapan muluk-muluk, dari kegiatan protes dan kritik terhadap Negara. Tapi pandangan mereka juga layak ditimbang secara kritis, karena bisa saja konservatif secara politik, dan keliru secara teoretik.

Watak konservatisme politik dari pandangan pesimis seperti itu, telah diuraikan di atas. Pandangan itu menindas setiap upaya dan semangat menggugat status quo.

Secara teoretik, mereka mengandalkan determinisme strukturalisme. Hubungan negara dan masyarakat dipahami bersifat statis. Ini merupakan sindrom khas kaum strukturalis, dengan akibat khas ketidakmampuan menjelaskan (bahkan membayangkan) perubahan sosial secara historis. Dalam bangunan "struktural" tak ada peluang bagi perubahan, karena semuanya terjalin rapat.

Dalam tulisan pertama mereka, kegagalan "pasti" dari pihak masyarakat dijelaskan dalam kerangka "secara struktural": negara terlalu kuat dan masyarakat terlalu lemah. Usul mereka, ketimbang bikin banyak kritik dan protes sia-sia, lebih baik jika masyarakat "meningkatkan kekuatan politik-ekonomi."

Kontradiksi pandangan itu gamblang: jika "secara struktural" masyarakat tak mungkin berhasil protes soal yang relatif "sepele" seperti ULLAJ, bagaimana mungkin mereka berhasil (bahkan berpeluang mencoba) meningkatkan kekuatan politik-

ekonomi?

Kita tak perlu mengikuti utopia model optimis yang disajikan di atas, untuk mengkritik Putra dan Abar. Lebih dari itu, kita membutuhkan alternatif. Memang bukan di sini tempatnya, untuk menjelahi alternatif demikian. Tapi, sebuah sketsa kasus dapat diajukan di sini.

Paling sedikit ada cacat yang sama pada kedua model pandangan yang umum itu. Keduanya menganggap hubungan kekuasaan antara kelompok kuat dan rentan bersifat tunggal dan instrumental, bukannya majemuk dan penuh mutuan, kontradiktif.

Bagaimana contohnya dalam praktek yang konkret? Mungkin sepenuhnya salah, jika keberhasilan protes terhadap ULLAJ itu diukur oleh Putra dan Abar secara mutlak dengan terhapusnya sama sekali ULLAJ atau tidak. Tapi, ini hanya sebuah kemungkinan penilaian. Jelas salah jika makna politik dari peristiwa kontroversi ULLAJ dan hubungan kekuasaan di Indonesia direduksi hanya atau terutama sebatas formalisme legal begitu.

Sama kelirunya jika protes terhadap ULLAJ dianggap hanya dan terutama bertujuan menghapuskannya secara mutlak. Salah satu butir "keberhasilan" masyarakat dalam kasus itu ialah, kemampuan bersuara secara kolektif dan publik. Apa yang disuarakan, merupakan soal lain dalam kemajemukan soal-soal yang saling terkait dan sesekali bisa saling berkontraksi.

*) Ariel Heryanto, staf pengajar UKSW, Salatiga